

Transparansi DPR RI

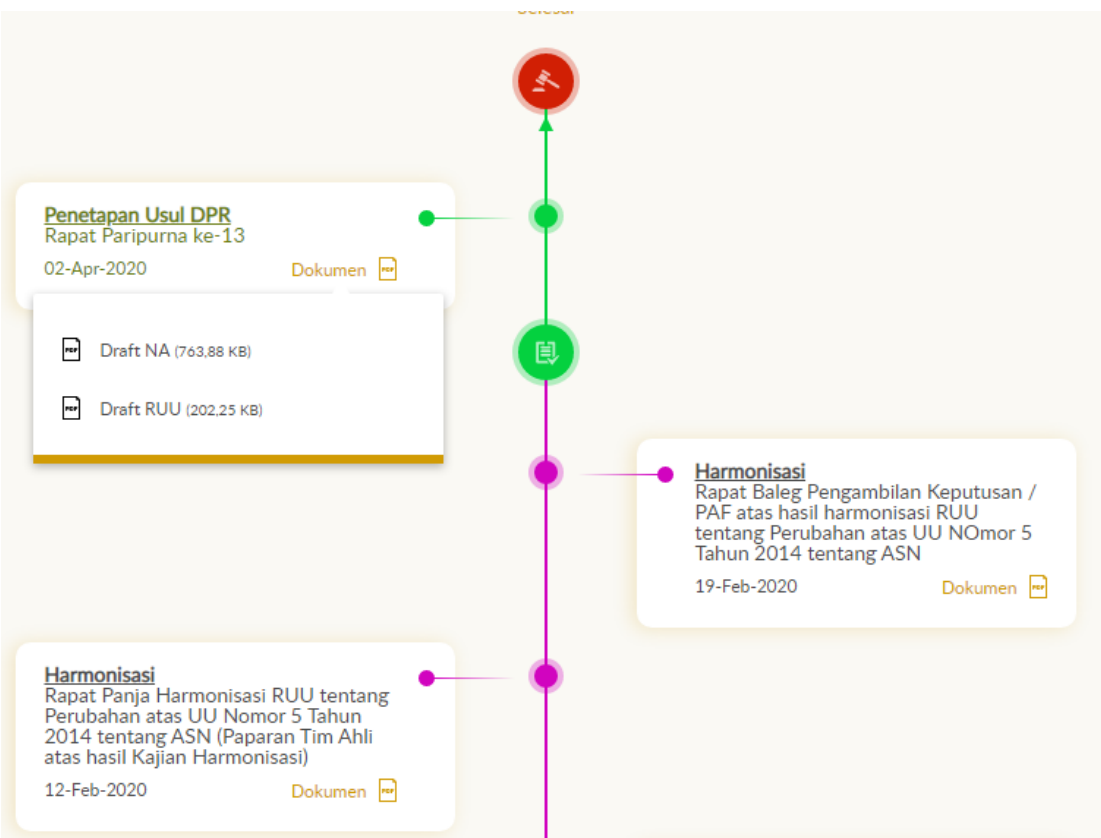
KOPEL Indonesia

Pengantar

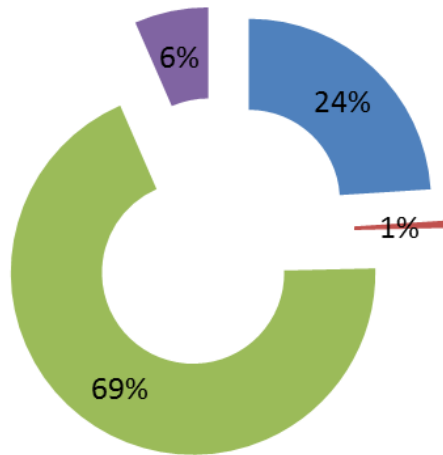
- * *Declaration of Parliamentary Openness in [World e-Parliament Conference 2012](#) in Rome dengan 25 poin keterbukaan informasi*
- * Indeks Persepsi Korupsi tahun 2021 oleh TII menempatkan DPR RI sebagai sebagai terkorupsi di Indonesia
- * Tuntutan perkembangan demokrasi di Indonesia. Ironi jika DPR sebagai lembaga representasi rakyat justru menjadi lembaga yang tidak demokratis
- * Tuntutan publik atas untuk terbukaan DPR. Masalah legislasi yang fatal terjadi diakhir 2020 saat pengesahan Revisi UU KPK, RUU Cipta Kerja, RUU MD3 dll.

Kebutuhan Informasi Legislasi

- * Poin penjelasan RUU dalam Prolegnas
- * Naskah Akademik
- * Risalah Rapat/catatan rapat
- * Pandangan Fraksi
- * RUU
- * UU



Informasi Renja dan Anggaran DPR RI



- Dukungan Tugas Sekjen DPR RI
- Dukungan Keahlian Fungsi Dewan
- Penguatan Kelembagaan DPR RI
- Pelaksanaan Fungsi DPR RI



Total Budget 2020 : Rp 4,8 Triliun



Informasi Profile Anggota DPR

- * Profil individual anggota DPR
- * Informasi Daerah Pemilihan
- * Kegiatan individual
- * Laporan kinerja individual



Informasi MKD



- * Syarat dan prosedur pengaduan
- * Update tindak lanjut pengaduan
- * Jadwal rapat MKD untuk tindak lanjut pengaduan
- * Keputusan MKD

Permasalahan

- * NA atau poin utama tentang RUU tidak tersedia dalam daftar Prolegnas
- * Risalah/catatan rapat hanya tersedia untuk rapat paripurna, untuk pembahasan RUU tidak
- * Renja dan Anggaran DPR RI 2021 tidak tersedia
- * Kegiatan-kegiatan di Kantor DPR RI dan di Dapil per anggota masih sangat minim baik di web maupun lewat media lain.
- * Update informasi dan agenda pembahasan pengaduan tidak tersedia

Rekomendasi

- * NA dipublikasikan secara online agar cepat diakses publik sejak masuk dalam daftar Prolegnas
- * Risalah per RUU itu penting agar publik bisa tahu riwayat dan gagasan yang muncul sepanjang pembahasan.
- * Renja dan anggaran selain sebagai informasi publik juga menaikkan trust publik terhadap akuntabilitas
- * MKD butuh lebih informatif agar menjadi alat kelengkapan yang lebih dekat ke publik dan menjaga citra DPR





* sekian